



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 15 Maret 2026/Periodik - 2025)

Status Verifikasi Administratif Lengkap

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KOTA SURABAYA
UNIT KERJA : INSPEKTORAT DAERAH

I. DATA PRIBADI

1. Nama : IKHSAN
2. Jabatan : INSPEKTUR DAERAH
3. NHK : 179456

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN **Rp.** **8.365.500.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 240 m2/255 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , HASIL SENDIRI Rp. 1.656.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 1.917.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/360 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 1.917.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 300 m2/540 m2 di KAB / KOTA KOTA SURABAYA , Rp. 2.875.500.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN **Rp.** **400.000.000**

1. MOBIL, MERCEDES BENZ E320MT Tahun 1996, HASIL SENDIRI Rp. 85.000.000
2. MOBIL, MITSUBHISI PAJERO SPORT 2.5 HP-E 4X2 5AT Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
3. MOBIL, BMW 318 I Tahun 1989, HASIL SENDIRI Rp. 55.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA **Rp.** **1.164.211.000**

D. SURAT BERTAGIH **Rp.** **----**

E. KAS DAN SETARA KAS **Rp.** **867.152.546**

F. HARTA LAINNYA **Rp.** **----**

Sub Total **Rp.** **10.796.863.546**

III. HUTANG **Rp.** **5.193.785.015**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)**

Rp.

5.603.078.531

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.